

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, perusahaan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi neraca, kinerja perusahaan, maupun perubahan posisi keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (SAK, 2004). Laporan keuangan yang dihasilkan haruslah relevan, andal, dan dapat dimengerti. Dengan adanya kebebasan dan fleksibilitas dari standar akuntansi, manajemen perusahaan akan memanfaatkan celah dan peluang untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanipulasi pelaporan keuangan yang sebenarnya (Alves, 2014).

Di samping itu, masing-masing perusahaan pasti memiliki target laba yang telah disepakati bersama untuk mempertahankan keberlangsungan dari entitas terkait (Susanto & Pradipta, 2016). Namun, dalam situasi tertentu manajer pasti tidak dapat selalu memenuhi target laba yang telah disepakati. Dengan begitu, manajemen akan berusaha untuk mengintervensi pelaporan keuangan melalui upaya manipulasi laba saat ini dengan mengorbankan laba dikemudian hari (Graham et al., 2005). Miopia manajerial ini muncul karena investor dan analis luar biasanya mengandalkan pendapatan periode saat ini ketika membentuk ekspektasi mereka pada pendapatan masa depan dan berbagai kewajiban kontraktual, misalnya kontrak bonus berbasis pendapatan dan perjanjian hutang (Kim & Sohn, 2013). Pada umumnya, manajemen memiliki kendali yang cukup besar untuk dapat melakukan manajemen laba, yaitu dengan mengendalikan beban akrual (beban iklan, beban penelitian dan pengembangan) dan mengubah waktu pengakuan pendapatan serta beban, misalnya dengan memajukan pengakuan pendapatan secara kredit atau menunda pengakuan kerugian dengan menunggu pembentukan cadangan kerugian (Teoh et al., 1998). Namun, apabila dilihat dari segi negatif, manajemen laba bisa saja dipersalahkan untuk mengecoh pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi perusahaan yang

Ericha Pricella, 2021

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA DALAM PERUSAHAAN TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2019)
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sebenarnya. Hal ini dikarenakan manajemen laba digunakan untuk memengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada nilai perusahaan (Healy & Wahlen, 1999).

Praktik manajemen laba selalu mendapatkan perhatian yang cukup besar dari regulator dan *press media*. Dimulai dari kasus perusahaan terkenal di Amerika Serikat, misalnya Enron, WorldCom, Toshiba Corp, Lucent, Xerox dan Tyco International. Hal ini menjadi pemicu kekhawatiran masyarakat terhadap informasi akuntansi yang disebarluaskan melalui pasar modal dan kode etik yang diterapkan akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, sesuai amanat yang tercantum di Sarbanes Oxley Act (SOX) pada Juli 2002, perusahaan terdaftar di Amerika Serikat harus melakukan perombakan besar dalam persyaratan tata kelolanya.

Di Indonesia, praktik manajemen laba juga masih sering terjadi. Perusahaan Asian Agri yang bergerak dalam usaha kelapa sawit juga ditemukan telah melakukan manipulasi pajak dengan membebankan biaya pada laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara sebesar Rp1,29 triliun akibat dari kasus Asian Agri (Tempo, 2011). Pada 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar US\$809,85 ribu pada 2018 atau setara Rp11,56 miliar (kurs Rp14.300). Namun tahun 2017 Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$216,58 juta atau setara dengan Rp3,09 triliun (CNN Indonesia, 2019). Hal ini dinyatakan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menemukan bahwa besarnya selisih diketahui dari adanya kontrak kooperasi yang dilakukan oleh Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi untuk memasang peralatan internet dan hiburan pada 203 unit pesawat Garuda. Masalahnya, pendapatan selama 15 tahun ke depan ini diakui sebagai penerimaan Garuda pada tahun buku 2018. Padahal untuk menerapkan pengakuan akrual ini, perusahaan harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya dalam pengakuan piutang yang dibayarkan, yaitu perusahaan yang memiliki piutang harus memiliki terlebih dahulu hak tagih. Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Garuda akan memiliki hak tagih atas biaya kompensasi pemasangan layanan internet dan manajemen konten setelah perseroan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak. Kewajiban itu antara

lain menyediakan pesawat untuk dipasang perangkat layanan (CNN Indonesia, 2019). Perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang *consumer goods*, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau biasa disebut TPS Food juga ditemukan telah melakukan manipulasi laba setelah melalui audit oleh KAP Ernest & Young pada pelaporan keuangan tahun 2017. Ditemukan fakta bahwa TPS Food melakukan penggelembungan dana senilai Rp4 triliun, penggelembungan pendapatan Rp662 miliar, dan penggelembungan pada pos EBITDA sebesar Rp329 miliar (CNBC Indonesia, 2019). Selain daripada itu, kasus manipulasi laba yang terjadi pada tahun 2020 adalah ditemukannya laba semu dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2006 (CNN Indonesia, 2020). Setelah melalui pemeriksaan oleh BPK, maka BPK menyebut hasil sementara audit perhitungan resmi kerugian negara yang disebabkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebesar Rp16,9 triliun (Tempo, 2020). Nama PT Hanson International atau perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, maupun tambang batu bara ini juga disebut sebagai pihak yang berkontribusi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. OJK menemukan bahwa perusahaan ini melakukan manipulasi laba dengan melaporkan laba fiktif pada periode 2016, yaitu *overstated* dengan nilai material Rp 613 miliar. PT Hanson International melakukan pelanggaran SAK 44 tentang akuntansi aktivitas *real estate*, sehingga menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp17 triliun (Kompas, 2020).

Penerapan manajemen laba akan mengurangi keefektifan investasi perusahaan (Cohen & Zarowin, 2010). Hal ini dibuktikan dari turun drastisnya penawaran saham/ *Seasoned Equity Offering* (SEO) saat manajemen laba pasca SOX. Roychowdhury, (2006) juga meneliti tentang keberadaan manajemen laba dengan fokus terhadap tolak ukur yang mendasarinya, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Oleh karena itu, sudut pandang dari manajemen laba perlu diperluas kembali. Dengan memeriksa sejauh mana hubungan dari tata kelola internal akan memengaruhi praktik manajemen laba, yaitu dengan melengkapi penelitian terdahulu dan menguji seberapa besar dampak yang akan dihasilkan (Cheng et al., 2016)

Berdasarkan Asian Corporate Governance Association (2014), negara-negara di Asia termasuk Indonesia, mengalami tata kelola perusahaan yang kurang baik. Buktinya adalah Indonesia menduduki peringkat ke 35 dari 48 negara di dunia yang dilaporkan mengalami penurunan kualitas laba/pendapatan. Kualitas laba dari suatu perusahaan dilihat dari transparannya pengungkapan laporan keuangan perusahaan, karena semakin transparan laporan keuangan akan berpengaruh positif bagi kualitas dari laba perusahaan itu sendiri (Alves, 2014). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laba maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola perusahaan, yaitu dengan memperkuat mekanisme tata kelola internal.

Sesuai dengan teori agensi, kualitas laba sangat penting sebagai dasar pertanggungjawaban seorang agen terhadap prinsipal. Hal ini dikarenakan kualitas laba dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna dan relevant bagi para pemegang saham dalam mengambil keputusan atau bahkan memprediksikan pengembalian saham. Untuk menghasilkan kualitas laba yang baik, maka diperlukan tata kelola internal yang berkualitas (*Good Corporate Governance*). Salah satu upaya dewan komisaris untuk mendukung terciptanya tata kelola internal yang baik adalah dengan dibentuknya komponen komite audit. Sejak tanggung jawab dari dewan komisaris adalah bertindak sebagai perwakilan dari seluruh pemegang saham di segala kondisi, mereka tetap harus mengawasi kinerja manajer yang berusaha mengambil peluang untuk melakukan manipulasi (Sun et al., 2014). Disinilah peran komite audit diperlukan untuk mendukung keberhasilan tugas dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan. Selain itu, dari kacamata teori agensi suatu komite audit yang efektif akan meningkatkan pengawasan untuk melindungi kepentingan pemegang saham sehingga akan mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas laba (Adiguzel, 2013; Azzoz & Khamees, 2016; McKnight & Weir, 2009).

Untuk memperkuat fungsi daripada komite audit itu sendiri, maka diperlukan karakteristik penunjang yang harus dimiliki. Secara spesifik komite audit yang dimaksud adalah independen, *expertise*, dan *tenure*. Mekanisme pemantauan internal yang dilakukan oleh dewan direksi dan komite audit independen, memiliki peran penting dalam terwujudnya kualitas laba yang efektif

(Surbakti & Shaari, 2018). Berdasarkan persyaratan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, 2012, bahwa harus terdapat paling sedikit 30% jumlah dewan komisaris independen dari seluruh total dewan konstitusi perusahaan, karena semakin banyaknya dewan independen maka akan mengurangi terjadinya manipulasi laba (Osma & Noguera, 2007). Klein, (2002) menemukan pengaruh negatif dan signifikan pada hubungan antara komisi independen dan manajemen laba. Namun, terdapat penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara keduanya (Taco & Ilat, 2016). Selain itu, komite audit yang berpengalaman dalam dunia keuangan atau akuntansi juga akan mempermudah dewan direksi dalam mengawasi proses pelaporan keuangan yang efektif (Sun et al., 2014; Carcello et al., 2011; Surbakti & Shaari, 2018). Namun, beberapa studi menemukan bahwa komite audit expertise tidak berpengaruh signifikan dalam menekan praktik manajemen laba (Tiffany & Wijaya, 2020; Andreas Bambang Daryatno, 2020). Di samping itu, masa jabatan anggota komite audit juga merupakan poin penting yang harus diperhatikan. BAPEPAM-LK, 2012, membatasi masa jabatan anggota komite audit yaitu maksimal 10 tahun. Dengan harapan masa jabatan yang terbatas akan memicu komite audit menjadi lebih independen lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas laporan keuangan. Namun beberapa penelitian terdahulu tidak menggunakan karakteristik komite audit *tenure* sebagai salah satu komponen yang diteliti dalam meningkatkan keefektifan komite audit (Tiffany & Wijaya, 2020; Andreas Bambang Daryatno, 2020; Taco & Ilat, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menjadikan komite audit *tenure* sebagai salah satu komponen pokok yang harus diteliti dalam meningkatkan karakteristik komite audit, selain komite audit independen dan komite audit expertise.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan agar mengetahui karakteristik komite audit sebagai penunjang dalam menekan jumlah praktik manajemen laba di Indonesia. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk mengulik lebih dalam terkait pengukuran manajemen laba riil yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan hasil dari peneliti-peneliti terdahulu, yaitu dengan menggunakan pengukuran berdasarkan Cohen et al., (2008) yang merupakan pengukuran lanjutan dari Roychowdhury, (2006). Pada penelitian kali ini, peneliti

berupaya secara eksplisit mengungkapkan peran dan dampak dari adanya komite audit dalam mengatasi manajemen laba. Terdapat tiga karakteristik sebagai penunjang efektifnya tugas komite audit, yaitu komite audit independen, komite audit *expertise*, dan komite audit *tenure*. Singkatnya, efektivitas komite audit dapat memberi pengaruh positif, baik dalam menekan terjadinya praktik manajemen laba dengan meningkatkan kualitas laba dan meminimalisir pelaporan keuangan yang salah saji, sehingga mengurangi asimetri informasi antara prinsipal–agen dan membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi (Surbakti et al., 2017). Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba dalam Perusahaan Terdaftar di Indonesia.”**

1.2 Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dijadikan fokus penelitian dapat dijabarkan secara lebih spesifik dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba?
- b. Apakah komite audit *expertise* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba?
- c. Apakah komite audit *tenure* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan sesuai perumusan masalah yang dibentuk peneliti, secara garis besar tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh komite audit independen dalam menekan terjadinya manajemen laba .
- b. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh komite audit *expertise* dalam menekan terjadinya manajemen laba.
- c. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh komite audit *tenure* dalam menekan terjadinya manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut peneliti berdasarkan pokok permasalahan yang dibentuk maka signifikansi atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini ada tiga yaitu :

a. Aspek Teoritis

Dapat mengembangkan teori yang berhubungan dengan efek karakteristik komite audit terhadap manajemen laba dalam perusahaan terdaftar di Indonesia

b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Investor. Sebagai sarana untuk mempermudah investor dalam menentukan perusahaan yang akan diberi investasi berdasarkan kualitas laba dari laporan keuangan perusahaan yang dituju.
- 2) Kreditor. Sebagai sarana untuk memberi pandangan kepada kreditor dalam menilai kualitas manajemen suatu perusahaan yang akan diberi pinjaman.
- 3) Pemerintah. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai efek dari dibentuknya karakteristik komite audit terhadap manajemen laba dalam perusahaan terdaftar di Indonesia